



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS
BERDASARKAN IPSAS 27 PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER
(Studi Empiris pada Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm)**

SKRIPSI

Oleh

Rizma Noviana

NIM 160810301079

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS
BERDASARKAN IPSAS 27 PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER
(Studi Empiris pada Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember*

Oleh

Rizma Noviana

NIM 160810301079

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas rahmat dan hidayah-Nya untuk kemudahan pembuatan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Mochammad Maskur, Ibu Komsatun, Adik Moh. Arga Dwi Saputra, saudara-saudara dan keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun materil, yang selalu kuat berusaha memberikan yang terbaik untuk masa depan saya. Terima kasih atas nasehat, usaha, dan jerih payah selama ini;
2. Dosen Pembimbing Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak. dan Dr. Wahyu Agus Winarno, S.E., M.Sc., Ak. beserta guru-guru terbaikku dari kanak-kanak sampai perguruan tinggi, terimakasih atas bimbingan dan semua bekal ilmu yang diberikan;
3. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu menemani perjalanan hidupku, terimakasih atas do'a dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2016 terimakasih atas do'a dan semangatnya; dan
5. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Binis Universitas Jember yang saya banggakan.

MOTTO

“Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengan-Nya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya”

(HR. Tirmidzi)

(No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself)

(RM BTS)

“Apapun yang sedang kamu usahakan jangan pernah lupa tawakalnya serta amalannya”

(Orang Tuaku)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizma Noviana

NIM : 160810301079

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan IPSAS 27 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember (Studi Empiris Pada Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Desember 2019

Yang menyatakan,

Rizma Noviana
NIM 160810301079

SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS
BERDASARKAN IPSAS 27 PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER
(Studi Empiris pada Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm)**

Oleh

Rizma Noviana

NIM 160810301079

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Wahyu Agus Winarno, S.E., M.Sc., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS BERDASARKAN IPSAS 27 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER (Studi Empiris pada Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm)

Nama Mahasiswa : Rizma Noviana

NIM : 160810301079

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal : 25 November 2019

Persetujuan

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak.
NIP. 196701021992032002

Dr. Wahyu Agus Winarno, S.E., M.Sc., Ak.
NIP. 198308102006041001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1-Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19780927 200112 1002

PENGESAHAN

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS
BERDASARKAN IPSAS 27 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER
(Studi Empiris pada Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rizma Noviana
NIM : 160810301079
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitian penguji pada tanggal:

9 Desember 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Susunan Panitia Penguji

Ketua : **Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak.** : (.....)
NIP. 19791014200911001

Sekretaris : **Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA., Ak.** : (.....)
NIP. 198209122006042002

Anggota : **Kartika, S.E., M.Sc., Ak.** : (.....)
NIP. 198202072008122002



Mengetahui dan Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP. 197107271995121001

Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan IPSAS 27 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember (Studi Empiris pada Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm)

Rizma Noviana

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset biologis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember berdasarkan IPSAS 27 *Agriculture*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset biologis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember didasarkan pada PSAP 07 Aset Tetap yang memiliki perbedaan dengan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan IPSAS 27 yang lebih menghasilkan informasi andal dan relevan terkait pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengakuan aset biologis. Karakteristik aset biologis yang berbeda dari aset tetap membutuhkan standar yang secara khusus untuk mengatur perlakuan akuntansinya. Namun dalam penerapan IPSAS 27, masih terdapat kesulitan dalam hal penentuan nilai wajar, sehingga diperlukan penelitian terlebih dahulu terkait biaya dan manfaat jika melakukan adopsi dari IPSAS 27.

Kata Kunci: aset biologis, IPSAS 27 *Agriculture*, nilai wajar, PSAP 07 Aset Tetap.

The Analysis of Accounting Treatment in Biological Asset Based on IPSAS 27 at Food Security and Animal Husbandry Department in Jember (Empirical Studies on Rembangan Dairy Farm)

Rizma Noviana

Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of Jember

ABSTRACT

This study aims to analyze the accounting treatment of biological assets Food Security and Animal Husbandry Department in Jember based on IPSAS 27 Agriculture. This research is a qualitative descriptive study. The research was conducted through study of literature and field research namely direct interviews, observations, and documentation. The results showed that the accounting treatment of biological assets at Food Security and Animal Husbandry Department in Jember was based on PSAP 07 Fixed Assets which had differences with the accounting treatment of biological assets based on IPSAS 27 which produced more reliable and relevant information related to the recognition, assessment, presentation and recognition of biological assets. . The characteristics of biological assets that are different from fixed assets require specific standards to regulate their accounting treatment. However, in the application of IPSAS 27, there are still difficulties in determining the fair value, so that research is needed in advance related to costs and benefits when adopting IPSAS 27.

Keywords: *biological assets, IPSAS 27 Agriculture, fair value, PSAP 07 Fixed Asset.*

RINGKASAN

Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan IPSAS 27 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember (Studi Empiris pada Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm); Rizma Noviana, 160810301079; 2019; 77 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Indonesia merupakan negara dengan luas daratan mencapai jutaan kilometer. Kondisi alam yang baik tersebut dimanfaatkan oleh banyak penduduk untuk mengembangkan usaha pada sektor agrikultur yaitu sektor pertanian dan sektor peternakan. Sektor pertanian dan peternakan juga menjadi salah satu sumber pemacu pertumbuhan perekonomian negara sehingga selain sektor swasta dan sektor publik, sektor pemerintah daerah juga ikut terlibat dalam aktivitas agrikultur. Dalam penyelenggaraan urusan sektor agrikultur tersebut, maka pemerintah tidak dapat terlepas dari pengelolaan tanaman dan hewan hidup sehingga hal ini akan berdampak pada kepemilikan tanaman dan hewan hidup oleh pemerintah. Tanaman dan hewan hidup ini dikenal sebagai aset-aset biologis. Kepemilikan aset biologis ini pada akhirnya akan berdampak pada pelaporan keuangan bagi pemerintahan.

Aset biologis didefinisikan sebagai tanaman hidup maupun perkebunan serta ternak yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adanya transformasi pertumbuhan dalam aset biologis akan berdampak pada pengukuran yang dapat memperlihatkan nilai wajar yang sesuai dengan kontribusinya untuk memberikan keuntungan ekonomis bagi suatu entitas atau perusahaan. Apabila terjadi kesalahan pada pengalokasian biaya dalam pengidentifikasian nilai aset biologis, maka akan mengakibatkan informasi yang dihasilkan tidak andal dan tidak relevan dalam suatu laporan keuangan yang dibuat oleh suatu entitas.

Sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan di bidang keuangan, laporan keuangan dibuat pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Hal ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kerja keuangan. Entitas pemerintahan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam pelaksanaan kebijakan akuntansi yang dipraktikkan. SAP yang menjadi pedoman untuk perlakuan akuntansi aset biologis di pemerintahan yaitu PSAP 07 dan Bultek 15 tentang Aset Tetap. SAP belum mengatur secara khusus bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset biologis. Sedangkan berdasarkan standar internasional, perlakuan akuntansi aset biologis di sektor publik diatur dalam *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 27 Agriculture* yang juga merupakan konvergensi dari IAS 41.

Penelitian ini akan dilakukan pada salah satu dari jenis peternakan yang banyak dikembangkan, yaitu pada peternakan sapi perah. Penelitian ini dilakukan di Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember pada periode pelaporan tahun 2018 dengan menganalisis berdasarkan *IPSAS 27 Agriculture*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset biologis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember didasarkan pada PSAP 07 Aset Tetap yang memiliki perbedaan dengan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan *IPSAS 27* yang lebih menghasilkan informasi andal dan relevan terkait pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengakuan aset biologis. Karakteristik aset biologis yang berbeda dari aset tetap membutuhkan standar yang secara khusus untuk mengatur perlakuan akuntansinya. Namun dalam penerapan *IPSAS 27*, masih terdapat kesulitan dalam hal penentuan nilai wajar, sehingga diperlukan penelitian terlebih dahulu terkait biaya dan manfaat jika melakukan adopsi dari *IPSAS 27*.

SUMMARY

The Analysis of Accounting Treatment in Biological Asset Based on IPSAS 27 at Food Security and Animal Husbandry Department in Jember (Empirical Studies on Rembangan Dairy Farm); Rizma Noviana, 160810301079; 2019; 77 pages; Accounting Department, Faculty of Economics and Business University of Jember

Indonesia is a country with land area reaching millions of kilometers. This good natural condition is used by many residents to develop businesses in the agricultural sector, namely the agriculture sector and the livestock sector. The agriculture and livestock sector is also one of the sources of economic growth booster so that in addition to the private sector and the public sector, the local government sector is also involved in agricultural activities. In carrying out the affairs of the agricultural sector, the government cannot be separated from the management of plants and live animals so that this will have an impact on the ownership of live plants and animals by the government. These living plants and animals are known as biological assets. The ownership of these biological assets will ultimately have an impact on financial reporting for the government.

Biological assets are defined as living plants and plantations and livestock owned by companies with the aim of making a profit. The existence of growth transformation in biological assets will have an impact on measurements that can show fair value in accordance with its contribution to provide economic benefits for an entity or company. If there is an error in the allocation of costs in identifying the value of biological assets, then the resulting information is not reliable and irrelevant in a financial statement prepared by an entity.

AS form of transparency in the management of the financial sector, financial statements are made by the government as a form of performance accountability. This has the aim of increasing financial work accountability. Government entities are guided by Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) in

implementing accounting policies that are practiced. SAP, which is a guideline for the treatment of biological asset accounting in government, is PSAP 07 and Bultek 15 concerning Fixed Assets. SAP has not specifically regulated how accounting treatment for biological assets. Whereas based on international standards, the treatment of biological asset accounting in the public sector is regulated in the 27th International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) which is also a convergence of IAS 41.

This research will be conducted on one of the types of farms that are widely developed, namely on dairy farms. This research was conducted at the Rembangan Dairy Farm Dairy Farm managed by Food Security and Animal Husbandry Department in Jember in the 2018 reporting period by analyzing based on IPSAS 27 Agriculture. This research is a qualitative descriptive study. The study was conducted through library research and field research that is direct interviews, observation, and documentation. The results showed that the accounting treatment of biological Food Security and Animal Husbandry Department in Jember was based on PSAP 07 Fixed Assets which had differences with the accounting treatment of biological assets based on IPSAS 27 which produced more reliable and relevant information related to the recognition, assessment, presentation and recognition of biological assets. . The characteristics of biological assets that are different from fixed assets require specific standards to regulate their accounting treatment. However, in the application of IPSAS 27, there are still difficulties in determining the fair value, so that research is needed in advance related to costs and benefits when adopting IPSAS 27.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan IPSAS 27 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember (Studi Empiris pada Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memberikan saran serta masukan dalam proses pengerjaan skripsi ini;
5. Dr. Wahyu Agus Winarno, S.E., M.Sc., Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan saran dan masukan serta meluangkan waktu dan pikiran dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Rochman Effendi, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
7. Keluarga besar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, yakni Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
8. Keluarga Paduan Suara Mahasiswa “Melodynomi” periode 2017 dan 2018 yang telah memberikan banyak pengalaman berharga kepada penulis;

9. Kedua orang tua tercinta, Ibu Komsatun dan Bapak Mochammad Maskur yang tiada henti membimbing dan memberikan dukungan beserta doa kepada penulis hingga dapat mencapai titik ini;
10. Untuk adik Moh. Arga Dwi Saputra yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
11. Untuk kakak sepupu Niani'atus Sholichah yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
12. Keluarga besar yang telah memberikan pelajaran hidup berharga bagi penulis sehingga menjadi motivasi untuk mencapai titik ini;
13. Teman belajar, sahabat serta kakak terbaik Dwicky Bramadicka Kusuma, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis;
14. Sahabat kos terbaik Ema Yustiana Santi, serta teman-teman kos *Cooking Academy* Mbak Siti Fatima, Novita Anggraini, Ilmiana Safira, Selvi Ari yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis;
15. Teman baik penulis selama masa perkuliahan, Kevin Dwijaya Pamungkas Sebo, Siti Wulandari, Nabila Karinda, Fariz Ahmadin Pufa, Maya Febriyanti, Siska Ayu Zumaroh, Ayang Marizca, Mega Devita, Juuliani, Nadia Herdiyanti, Ditio Adi Surya, Andrian Subangkit;
16. Teman-teman KKN 249 desa Mentor, Sumberasih, Probolinggo;
17. Para pembaca sekalian yang menjadikan skripsi ini bermanfaat.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, berbagai kritik dan saran yang membangun dibutuhkan untuk memperbaiki dan menjadikan skripsi ini bermanfaat.

Jember, 2 Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
RINGKASAN	x
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Akuntansi	7
2.1.1 Definisi Akuntansi	7
2.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi	7
2.1.3 Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum	8
2.2 Karakteristik Laporan Keuangan	8
2.3 Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)..	9
2.4 Aset	10
2.3.1 Definisi Aset	10
2.3.2 Klasifikasi Aset	11
2.5 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap Berbasih Akrual	12
2.6 Buletin Teknis SAP Nomor 15	13
2.7 IPSAS 27 Agriculture	14
2.4.1 Ruang Lingkup	14
2.4.2 Istilah-istilah dalam Agrikultur	15
2.4.3 Pengakuan dan Pengukuran	16
2.4.4 Keuntungan dan Kerugian	17
2.4.5 Ketidakmampuan Mengukur Nilai wajar Secara Andal	17
2.4.6 Pengungkapan	18
2.4.7 Pengungkapan Tambahan untuk Aset Biologis yang Nilai Wajarnya tidak dapat Diukur	19
2.4.8 Perbedaan IPSAS 27 dengan PSAK 69	20

2.8 Penelitian Terdahulu	21
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Lokasi Penelitian	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.3.1 Jenis Data	27
3.3.2 Sumber Data	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Uji Keabsahan Data	29
3.6 Teknik Analisis Data	30
3.7 Kerangka Penelitian	31
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember	32
4.1.1 Sejarah Berdirinya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember	32
4.1.2 Struktur Organisasi	33
4.2 Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan kabupaten Jember	34
4.2.1 Pengakuan Aset Biologis.....	35
4.2.2 Pengukuran Aset Biologis	35
4.2.3 Penyajian Aset Biologis	36
4.2.4 Pengungkapan Aset Biologis.....	36
4.3 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember dengan Perlakuan Akuntansi Aset Biologis berdasarkan IPSAS 27	37
4.3.1 Pengakuan Aset Biologis	37
4.3.2 Pengukuran Aset Biologis.....	38
4.3.3 Penyajian Aset Biologis	45
4.3.4 Pengungkapan Aset Biologis	46
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Keterbatasan Penelitian	53
5.3 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Contoh Klasifikasi Aset Biologis menurut IPSAS 27	15
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	23
Table 4.1 Data Perkembangan Ternak Sapi Perah Rembangan.....	34
Table 4.2 Perbandingan Pengakuan Aset Biologis menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan IPSAS 27	37
Tabel 4.3 Perbandingan Perhitungan Pengukuran Aset Biologis menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan IPSAS 27	40
Tabel 4.4 Perbandingan Perhitungan Pengukuran Kembali Aset Biologis menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan IPSAS 27	42
Tabel 4.5 Perbandingan Pengukuran Aset Biologis menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan IPSAS 27	44
Tabel 4.6 Perbandingan Penyajian Aset Biologis menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan IPSAS 27	46
Tabel 4.7 Perbandingan Pengungkapan Aset Biologis menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan IPSAS 27	47
Table 4.8 Perbandingan Neraca Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan IPSAS 27	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember	33



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan luas daratan mencapai jutaan kilometer. Kondisi alam yang baik tersebut dimanfaatkan oleh banyak penduduk untuk mengembangkan usaha pada sektor agrikultur yaitu sektor pertanian dan sektor peternakan. Pertanian yang banyak dikembangkan di Indonesia yaitu padi, kedelai, jagung, rempah-rempah, kopi, teh, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan peternakan yang banyak dikembangkan diantaranya peternakan kerbau, kambing, sapi, domba, babi, dan unggas. Selain itu, sektor pertanian dan peternakan juga menjadi salah satu sumber pemacu pertumbuhan perekonomian negara sehingga selain sektor swasta dan sektor publik, sektor pemerintah daerah juga ikut terlibat dalam aktivitas agrikultur. Sehingga baik secara aktif maupun pasif pemerintah terlibat dalam aktivitas agrikultur karena merupakan salah satu urusan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam penyelenggaraan urusan sektor agrikultur tersebut, maka pemerintah tidak dapat terlepas dari pengelolaan tanaman dan hewan hidup sehingga hal ini akan berdampak pada kepemilikan tanaman dan hewan hidup oleh pemerintah. Tanaman dan hewan hidup ini dikenal sebagai aset-aset biologis. Kepemilikan aset biologis ini pada akhirnya akan berdampak pada pelaporan keuangan bagi pemerintahan.

Aset yang dimiliki oleh entitas agrikultur berbeda dengan aset yang dimiliki entitas di sektor lain (Farida, 2013). Perbedaannya yaitu terlihat pada transformasi biologis dan aktivitas agrikulturnya dimana aset biologis menghasilkan suatu produk yang bisa dikonsumsi maupun diolah lebih lanjut. Ridwan (2011) mengungkapkan akibat perbedaan ini, entitas yang beroperasi di sektor agrikultur lebih besar kemungkinannya untuk memberikan informasi yang lebih bias dibanding dengan entitas yang beroperasi di sektor lainnya, khususnya terkait pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap yang berwujud aset biologisnya. Aset biologis diartikan sebagai tanaman hidup atau

perkebunan serta ternak yang perusahaan miliki untuk tujuan mendapatkan manfaat. Adanya transformasi pertumbuhan dalam aset biologis akan berdampak pada pengukuran yang dapat memperlihatkan nilai wajar yang sesuai dengan kontribusinya untuk memberikan keuntungan ekonomis bagi suatu entitas atau perusahaan. Apabila terjadi kesalahan pada pengalokasian biaya dalam pengidentifikasian nilai aset biologis, maka akan mengakibatkan informasi yang dihasilkan tidak andal dan tidak relevan dalam suatu laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas.

Sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan di bidang keuangan, laporan keuangan dibuat pemerintah sebagai bukti tanggung jawab kerjanya. Hal ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kerja keuangan. Entitas pemerintahan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam pelaksanaan kebijakan akuntansi yang dipraktikkan. SAP ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP disempurnakan dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis (Bultek) sebagai uraian lebih lanjut dan penjelasan teknis akuntansi. SAP yang menjadi pedoman untuk perlakuan akuntansi aset biologis di pemerintahan yaitu PSAP 07 dan Bultek 15 tentang Aset Tetap. PSAP 07 tidak mengatur secara eksplisit tentang aset biologis. Pengukurannya dinilai berdasarkan harga perolehan dan tidak dilakukan penyusutan. Harga perolehan meliputi keseluruhan pengeluaran yang dibayarkan guna memperoleh aset hingga aset tersebut siap dimanfaatkan. Aset biologis yang sudah mati akan dilakukan penghapusan, sehingga dengan demikian tidak ada penilaian kembali selama aset masih digunakan atau dimiliki.

Di Indonesia, standar yang digunakan untuk melakukan pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan aktivitas agrikultur untuk aset biologis di sektor swasta saat ini yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69: Agrikultur yang merupakan hasil adopsi *International Accounting Standards* (IAS) 41: *Agriculture* yang memberikan pedoman tentang perlakuan akuntansi aset biologis. Dengan digunakannya PSAK 69 bagi sektor swasta, maka penilaian

dan pengukuran aset biologis diharapkan menjadi lebih tepat karena didasarkan pada nilai wajar, bukan lagi didasarkan harga perolehannya. Sedangkan untuk sektor pemerintahan di Indonesia, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) belum memberikan ketentuan secara khusus bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset biologis. Sedangkan berdasarkan standar internasional, perlakuan akuntansi aset biologis di sektor publik diatur dalam *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 27 Agriculture* yang juga merupakan konvergensi dari IAS 41. IPSAS 27 Agriculture dikeluarkan oleh IPSASB pada bulan Desember 2009. IPSAS 27 memberikan pedoman bagi entitas sektor publik terkait perlakuan akuntansi atas aktivitas agrikultur. Melihat perkembangan di sektor swasta yang sudah menggunakan PSAK 69, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam upaya melakukan konvergensi sehingga tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsi IPSAS 27 ke dalam SAP. IPSAS 27 sendiri juga merupakan adopsi dari IAS 41, sehingga ketentuan mengenai akuntansi aset biologis dalam IPSAS 27 ini mayoritas sama dengan ketentuan aset biologis yang diatur IAS 41 yang saat ini telah diadopsi dalam PSAK 69, seperti ketentuan lain yang terkait dengan pengakuan dan penilaian, keuntungan dan kerugian, ketiadaan pengukuran nilai wajar yang andal, serta pengungkapan.

Berdasarkan penelitian Margarita Legenkova (2016) yang dilakukan di Rusia menyebutkan bahwa penggunaan IPSAS sebagai standar nasional dan laporan keuangan sektor publik dapat meningkatkan kualitas informasi akuntan dan memberikan informasi dan gambaran lengkap tentang posisi keuangan entitas sehingga mudah dimengerti bagi pengguna asing. Kemudian penelitian Ijeoma, N.B. (2018) yang dilakukan di Nigeria memberikan pernyataan bahwa penerapan IPSAS akan meningkatkan keandalan, kredibilitas, dan integritas pelaporan keuangan pemerintah, serta memberikan kontrol internal yang efisien dalam manajemen keuangan sehingga pemerintahan akan memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, berdasarkan penelitian Natasari dkk (2018), hasil penelitian menyarankan bahwa SAP sebaiknya mengadopsi IPSAS 27 agar mendapat ketentuan yang lebih jelas bagaimana aset biologis harus diukur, dinilai,

dan disajikan dalam laporan keuangan karena karakteristik aset biologis berbeda dengan aset tetap. Penelitian lanjutan dari Natasari dkk (2019) yang dilakukan pada salah satu Dinas Pertanian X juga merekomendasikan ketentuan akuntansi aset biologis sesuai dengan IPSAS 27 karena standar tersebut mengatur diperlukannya pengukuran kembali atas nilai aset biologis setiap akhir periode laporan agar nilai tercatat sesuai kondisi aset. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis di sektor agrikultur yang berada dibawah naungan sektor pemerintahan, dengan menganalisis berdasarkan standar akuntansi aset biologis *IPSAS 27 Agriculture*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, banyak penelitian terkait perlakuan akuntansi aset biologis yang dilaksanakan di sektor swasta dan hasil penelitian menyebutkan bahwa masih banyak entitas sektor agrikultur yang pengukuran aset biologisnya menggunakan biaya historisnya seperti penelitian yang dilakukan Nafila (2018) pada PT Tabassam Jaya Farm dan penelitian Uzfilah dkk (2019) pada Organisasi Kelompok Budidaya Ikan. Kemudian masih banyak entitas yang belum menerapkan perlakuan akuntansi aset biologis sesuai standar, serta penelitian terdahulu banyak yang dilakukan pada sub sektor agrikultur perkebunan seperti penelitian yang dilakukan Valencia (2017) pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan dan penelitian Aisyah (2017) pada PT Perkebunan Nusantara X Jember Kebun Kertosari, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada sub sektor agrikultur yaitu peternakan.

Penelitian ini akan dilakukan pada salah satu dari jenis peternakan yang banyak dikembangkan, yaitu pada peternakan sapi perah. Penelitian ini dilakukan di Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm yang terbuka untuk penelitian dan pendidikan dan peternakan ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember pada periode pelaporan tahun 2018 dimana periode tersebut adalah setelah terjadi pemisahan SKPD yang semula Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Jember dipecah menjadi 2 Dinas yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Jember dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember. Berdasarkan studi pendahuluan, diperoleh informasi bahwa

aset hewan yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember yaitu sapi perah dan kuda, namun standar yang digunakan dalam IPSAS 27 tidak mengatur aset biologis yang digunakan dalam kegiatan jasa seperti kuda, sehingga penelitian akan terfokus pada aset biologis berupa sapi perah. Selain itu juga diperoleh informasi bahwa anak sapi yang lahir tidak dinilai dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, sehingga jumlah dan nilai sapi perah akan tetap dari tahun ke tahun dan hal ini akan berdampak terhadap laporan keuangan yang dibuat. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS BERDASARKAN IPSAS 27 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER (Studi Empiris pada Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember Unit Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember Unit Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm dengan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan IPSAS 27?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi aset biologis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember Unit Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi aset biologis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember Unit Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm berdasarkan perlakuan akuntansi aset biologis dalam IPSAS 27.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak yang memiliki relevansi kepentingan, antara lain:

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis terkait perlakuan akuntansi aset biologis selain peternakan sapi perah dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi yang membacanya.
2. Bagi Objek Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi objek penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan aset biologisnya.
3. Bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
Sebagai bahan pertimbangan bagi KSAP dalam perbaikan peraturan standar terkait.
4. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan khususnya bidang Akuntansi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

2.1.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi secara umum merupakan suatu mekanisme kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, pengolahan data serta penyajiannya, transaksi serta peristiwa yang terkait dengan keuangan sehingga dapat berguna dan dapat dimengerti untuk suatu proses penentuan keputusan bagi para penggunanya. Menurut *Financial Accounting Standard Board* (FASB) akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berguna untuk menyediakan informasi kualitatif yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mengambil keputusan ekonomi. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 476 KMK 01 tahun 1991, akuntansi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan menganalisa, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan suatu transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk memberikan sebuah informasi keuangan untuk penggunanya sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi dilakukan dalam suatu entitas, dapat berbentuk organisasi bisnis ataupun organisasi nirlaba untuk penyelenggaraan kegiatannya.

2.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Bidang-bidang akuntansi terdiri dari:

1. Bidang Akuntansi Publik:
 - a. Audit atas laporan keuangan (*auditing*)
 - b. Akuntansi perpajakan
 - c. Konsultasi manajemen
2. Bidang Akuntansi Intern:
 - a. Akuntansi beban
 - b. Penganggaran Audit intern
 - c. Akuntansi keuangan
 - d. Akuntansi manajemen

2.1.3 Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum

Prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu prinsip-prinsip serta konsep-konsep yang dipakai oleh para akuntan dalam penyusunan laporan keuangan (Jusup, 2011:14). Prinsip akuntansi tersebut dinyatakan dengan bentuk standar tertulis yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu:

1. Prinsip Reliabilitas (objektivitas)

Prinsip Reliabilitas (objektivitas) merupakan prinsip akuntansi yang menggunakan data yang dapat diandalkan untuk memperoleh informasi keuangan/akuntansi.

2. Prinsip Biaya Perolehan

Menentukan besarnya jumlah yang dicatat dalam catatan akuntansi ketika melakukan pembelian barang atau jasa.

2.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu suatu bentuk ukuran normatif dalam informasi akuntansi yang harus direalisasikan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut empat (4) karakteristik yang menjadi prasyarat normatif supaya laporan keuangan mampu memenuhi kualitas yang diinginkan: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami (Tanjung, 2012:14).

1. Relevan

Ketika informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan bisa berpengaruh dalam pengambilan keputusan pemakai laporan dengan membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa periode lalu atau periode saat ini, mengoreksi hasil evaluasi di periode sebelumnya, serta memprediksi periode yang akan datang. Informasi yang sesuai dan relevan merupakan informasi yang mempunyai manfaat umpan balik, tepat waktu, manfaat untuk memprediksi, dan lengkap.

2. Andal

Informasi yang andal memenuhi karakteristik penyajian yang jujur, netralitas, dan dapat diverifikasi. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan



harus tidak ada kesalahan material, pengertian yang ambigu dan menyesatkan, fakta yang disajikan dengan jujur, serta mapu dan dapat dibuktikan kebenarannya.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan dapat lebih bermanfaat apabila dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya (perbandingan internal) atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya (perbandingan eksternal). Perbandingan tersebut bisa dilaksanakan apabila suatu entitas menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten antar periode ke periode selanjutnya dan antar entitas yang diperbandingkan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama. Dan apabila terjadi suatu perubahan dalam penerapan kebijakan akuntansi tersebut, maka perubahan tersebut harus diungkapkan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan dapat dimengerti oleh para pemakainya dan informasi tersebut disesuaikan dengan batas pemahaman dari pemakai dalam bentuk penyajian dan istilah yang digunakan. Pemakai laporan diasumsikan telah mempunyai pemahaman dan wawasan yang cukup atas aktifitas dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta terdapat kemauan pemakai untuk mempelajari informasi yang dimaksudkan.

2.3 Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)

SKPD merupakan satuan organisasi di lingkungan pemerintahan daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) sebagai pengemban fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. SKPD merupakan entitas akuntansi yang merupakan satu bagian di pemerintahan yang melakukan pengelolaan anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang melakukan kegiatan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Sebagai entitas yang menggunakan anggaran/pengguna barang, entitas akuntansi melaksanakan kegiatan akuntansi dan melaporkan laporan keuangannya terkait dengan

anggaran/barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

2.4 Aset

2.3.1 Definisi Aset

Menurut PSAK No. 16 revisi tahun 2011 aset merupakan seluruh kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai harga dan nilai yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, dan akan memberikan manfaat bagi perusahaan atau seseorang tersebut. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia aset yaitu sumber daya yang dikuasi oleh entitas yang mendatangkan manfaat ekonomis di masa depan sebagai hasil dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. *International Accounting Standards Comitte juga* mendefinisikan aset sebagai suatu sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil kejadian masa lalu dimana diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis bagi entitas di masa depan. Selain itu, menurut *International Financial Reporting Standards* definisi aset yaitu suatu sumber daya yang dikontrol dan dikuasai oleh perusahaan yang diperoleh dari kejadian masa lalu (seperti diperoleh dengan membeli atau menciptakan sendiri) dan dari manfaat ekonomis waktu yang akan datang (arus kas masuk dan aset lain) yang diharapkan.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3 (tiga) poin penting yang menjadi karakteristik dari aset:

1. Aset merupakan hasil dari kejadian masa lalu.
2. Aset dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh suatu pihak.
3. Aset memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang.

2.3.2 Klasifikasi Aset

Aset dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan. Klasifikasi aset berdasarkan masa manfaatnya dan klasifikasi aset berdasarkan wujudnya (Kieso, 2016). Berdasarkan masa manfaatnya, aset diklasifikasikan menjadi aset lancar (*current asset*) dan aset tidak lancar atau aset tetap (*noncurrent asset/ fixed asset*). aset lancar (*current asset*) adalah aset yang mempunyai periode manfaat kurang dari dua belas bulan. Artinya, aset tersebut dapat dengan cepat dikonversi menjadi kas atau dinikmati manfaatnya kurang dari satu tahun atau satu siklus operasi. Contohnya kas, piutang, persediaan, dan perlengkapan. Berdasarkan PSAK No. 1 tahun 2015 tentang Penyajian Laporan Keuangan, entitas dapat mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar apabila:

1. Aset diperkirakan akan direalisasikan oleh entitas, atau aset ditujukan untuk dijual atau dimanfaatkan dalam siklus normal operasi.
2. Aset dimiliki entitas untuk tujuan diperdagangkan.
3. Aset diperkirakan direalisasikan entitas dalam kurun waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Aset merupakan kas atau setara kas.

Sedangkan aset tidak lancar atau aset tetap (*noncurrent asset/ fixed asset*) yaitu aset yang memiliki periode manfaat lebih dari satu tahun atau dua belas bulan. Artinya, aset tersebut tidak dapat dikonversi dengan mudah menjadi kas dan dapat dinikmati manfaatnya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Contohnya: tanah, gedung, mesin, kendaraan, atau dapat pula berupa investasi jangka panjang, aset tidak berwujud, dan sebagainya.

Aset berdasarkan wujudnya diklasifikasikan menjadi aset berwujud (*tangible asset*) dan aset tidak berwujud (*intangible asset*). Aset berwujud (*tangible asset*) yaitu semua aset yang mempunyai wujud nyata secara fisik. Contohnya: tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan aset tidak berwujud (*intangible asset*) yaitu semua aset yang tidak mempunyai bentuk fisik secara nyata. Contohnya: *goodwill*, dan *trademark*

2.5 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua

Standar akuntansi pemerintahan di Indonesia yang digunakan saat ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang dimaksud dalam PP 71 Tahun 2010. SAP Berbasis Akrua terdiri dari Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). PSAP saat ini berjumlah 12 pernyataan dengan rincian sebagai berikut:

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
3. PSAP 03 Laporan Arus Kas
4. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan
6. PSAP 06 Akuntansi Investasi
7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan.
11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
12. PSAP 12 Laporan Operasional

Berdasarkan PSAP 07 Aset Tetap, aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dan dimanfaatkan, atau ditujukan untuk dimanfaatkan dalam aktifitas pemerintahan maupun digunakan oleh masyarakat umum. Aset tetap digunakan sebagai sarana dalam penyediaan pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat umum.

Berdasarkan PSAP 07, pengklasifikasian dari aset tetap yaitu:

1. tanah
2. peralatan dan mesin
3. gedung dan bangunan
4. jalan, irigasi, dan jaringan
5. aset tetap lainnya, dan
6. konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap lainnya meliputi aset tetap yang tidak masuk kriteria ke dalam klasifikasi aset tetap yang lain. Aset tersebut harus didapat dalam kondisi siap digunakan dan dimanfaatkan untuk aktifitas operasional pemerintahan. Aset tetap lainnya ini dijelaskan dalam Buletin Teknis (Bultek) Nomor 15 sebagai pedoman penerapan secara teknis PSAP. Bultek Nomor 15.

PSAP 07 tidak secara khusus mengatur perlakuan akuntansi aset biologis. Perlakuan akuntansi aset biologis sama dengan perlakuan bagi kelompok aset tetap yang lain. Aset biologis diakui ketika terjadi perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan dan siap digunakan. Aset biologis yang telah diperoleh dinilai sebesar keseluruhan biaya ketika perolehan yaitu meliputi seluruh pengeluaran untuk mendapatkan hingga aset tersebut siap digunakan. Tidak terdapat penyusutan pada aset biologis, sehingga ketika aset biologis sudah mati atau tidak dapat dimanfaatkan maka akan dilakukan penghapusan aset. Dengan demikian tidak ada penyesuaian selama hewan atau tanaman tersebut masih hidup atau dimanfaatkan.

2.6 Buletin Teknis SAP Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua

Buletin Teknis Nomor 15 merupakan uraian lebih lanjut dan teknis akuntansi PSAP 07. Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 15 bab VI tentang Akuntansi Aset Tetap Lainnya, Aset tetap lainnya yaitu meliputi aset tetap yang tidak bisa dikelompokkan ke bagian kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk aktifitas operasional pemerintah dalam keadaan siap pakai. Klasifikasi dari aset tetap lainnya yaitu koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Selanjutnya yang dikategorikan aset tetap lainnya yaitu Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya perbaikan dari aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor.

Aset Tetap Lainnya diakui ketika hak kepemilikan atau penguasaan Aset Tetap Lainnya telah diterima atau berpindah dan aset telah siap digunakan oleh entitas. Kemudian untuk pengukurannya, Aset Tetap Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan dimana harga perolehan mencerminkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut hingga siap digunakan. Aset Tetap Lainnya disajikan pada laporan keuangan neraca berdasar pada biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali Aset Tetap Lainnya dalam bentuk hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik tetapi dilakukan penghapusan ketika aset tetap lainnya tersebut sudah mati atau tidak dapat dimanfaatkan. Selain itu, pengungkapan Aset Tetap Lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu mengungkapkan dasar yang digunakan dalam penilaian, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode, serta informasi penyusutan aset tetap lainnya.

2.7 IPSAS 27 Agriculture

IPSAS 27 dikeluarkan oleh IPSASB untuk memberikan pedoman dan acuan untuk entitas sektor publik tentang perlakuan akuntansi di dalam aktivitas agrikultur. Agar sesuai dengan konteks dalam sektor publik, IPSASB mengembangkan standar dengan melakukan program konvergensi bersama IFRS.

2.4.1 Ruang Lingkup

Berdasarkan IPSAS 27, entitas yang menyiapkan dan membuat laporan keuangan dengan basis akrual akan menerapkan standar ini saat entitas tersebut berhubungan dengan aktifitas kegiatan agrikultur yaitu aset biologis dan hasil pertanian pada titik panen. Selain Pemerintah Usaha Bisnis, standar ini diberlakukan untuk seluruh entitas sektor publik.

Table 1.1 Contoh klasifikasi aset biologis menurut IPSAS 27

<i>Biological Assets</i>	<i>Agriculture Produce</i>	<i>Products that are the result of processing after harvest</i>
<i>Sheep</i>	<i>Wool</i>	<i>Yarn, carpet</i>
<i>Trees in a plantation forest</i>	<i>Felled trees</i>	<i>Logs, lumber</i>
<i>Plants</i>	<i>Cotton</i>	<i>Thread, clothing</i>
	<i>Harvested cane</i>	<i>Sugar</i>
<i>Dairy cattle</i>	<i>Milk</i>	<i>Cheese</i>
<i>Pigs</i>	<i>Carcass</i>	<i>Sausages, cured hams</i>
<i>Bushes</i>	<i>Leaf</i>	<i>Tea, cured tobacco</i>
<i>Vines</i>	<i>Grape</i>	<i>Wine</i>
<i>Fruit trees</i>	<i>Picked fruit</i>	<i>Processed fruit</i>

Sumber: IPSAS 27 *Agriculture*, 2009

2.4.2 Istilah-Istilah dalam Agrikultur

Berikut merupakan pengertian dari istilah yang digunakan dalam IPSAS 27:

1. Aktivitas agrikultur (*agricultural activity*) adalah manajemen transformasi biologis dan panen (yaitu pelepasan produk atau pemberhentian proses kehidupan) aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan.
2. Produk agrikultur (*agricultural produce*) adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas.
3. Aset biologis (*biological asset*) adalah hewan atau tanaman hidup.
4. Biaya untuk menjual (*cost to sell*) adalah biaya tambahan yang langsung terkait dengan pelepasan suatu aset, tidak termasuk biaya keuangan dan pajak penghasilan.
5. Kelompok aset biologis (*group of biological*) adalah penggabungan dari hewan atau tanaman hidup yang serupa.
6. Panen (*harvest*) adalah pelepasan produk dari aset biologis atau pemberhentian proses kehidupan aset biologis.
7. Tanaman produktif (*bearer plant*) adalah tanaman hidup yang:
 - a. dimanfaatkan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur;

- b. diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan
 - c. mempunyai kemungkinan yang sangat kecil untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang incidental (*incidental scrap*).
8. Transformasi dari aset biologis ini terdiri atas proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang menyebabkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset biologis. Contoh dari aktivitas agrikultur ini seperti budidaya kebun dan perkebunan, kehutanan, budidaya bunga, peternakan, tanaman semusim (*annual*) atau tahunan (*perennial*), dan budidaya perikanan (termasuk peternakan ikan)

2.4.3 Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan IPSAS 27 paragraf 13 aset biologis atau produk agrikultur diakui oleh entitas ketika:

1. aset biologis dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari kejadian pada waktu lalu;
2. terdapat kemungkinan besar aliran manfaat ekonomi waktu mendatang terkait dengan aset biologis ke dalam entitas; dan
3. pengukuran nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat dilakukan dengan andal.

Pengukuran aset biologis dilakukan ketika pengakuan awal dan setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya untuk menjual, terkecuali untuk kasus yang dijelaskan dalam IPSAS 27 paragraf 34 dimana pengukuran nilai wajar tidak mampu dilakukan dengan andal. Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Saat entitas mendapatkan aset biologis dari non-pertukaran transaksi, aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada setiap tanggal pelaporan.

2.4.4 Keuntungan dan Kerugian

Berdasarkan IPSAS 27 paragraf 30, keuntungan atau kerugian yang muncul ketika pengakuan awal aset biologis atau produk agrikultur pada nilai wajarnya setelah dikurangi biaya penjualan dan dari perubahan nilai wajar ketika penilaian kembali aset biologis diakui dalam surplus atau defisit pada periode terjadinya keuntungan atau kerugian tersebut. Kemungkinan kerugian dapat muncul ketika pengakuan awal aset biologis dikarenakan pengurangan dari estimasi biaya penjalan dalam menetapkan nilai wajar, sedangkan keuntungan yang muncul ketika pengakuan awal contohnya yaitu seperti ketika lahirnya anak sapi, selain itu keuntungan atau kerugian dapat muncul ketika pengakuan awal produk agrikultur dari hasil panen.

2.4.5 Ketidakmampuan untuk Mengukur Nilai Wajar secara Andal

Berdasarkan IPSAS 27 paragraf 34, anggapan bahwa nilai wajar aset biologis bisa diukur dengan andal dapat ditolak hanya ketika pengakuan awal aset biologis. Ketika pengakuan awal aset biologis bisa terjadi harga kuotasi pasar dari aset biologis tersebut tidak tersedia dan yang pengukurannya menggunakan alternatif pengukuran nilai wajar secara pasti tidak dapat diandalkan. Jika hal itu terjadi, maka pengukuran aset biologis dapat dilakukan dengan biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Ketika pengukuran nilai wajar aset biologis tersebut dapat ditentukan secara andal, maka entitas mengukur aset biologis pada nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual. Ketika aset biologis tidak lancar memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok pembuangan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual) sesuai dengan standar akuntansi internasional atau nasional yang relevan yang terkait dengan aset lancar dimiliki untuk dijual dan operasi dihentikan, maka itu dianggap bahwa nilai wajar dapat diukur dengan andal.

2.4.6 Pengungkapan

IPSAS 27 paragraf 38 menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian agregat yang muncul selama periode saat ini pada pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis harus diungkapkan oleh entitas. Paragraf 39 mengungkapkan bahwa pengungkapan aset biologis, suatu entitas mendiskripsikan dalam bentuk deskripsi naratif atau kuantitatif untuk setiap kelompok aset biologis. Untuk membedakan antara aset biologis menghasilkan dan yang belum menghasilkan, atau aset biologis yang dapat dikonsumsi dan aset biologis produktif, entitas dianjurkan untuk memberikan deskripsi kuantitatif dari setiap kelompok aset biologis sesuai kondisi aset biologis.

Jika dalam informasi yang diterbitkan bersama dengan laporan keuangan tidak terdapat pengungkapan aset biologis di bagian manapun, maka entitas harus memberikan deskripsi yaitu:

1. setiap kelompok aset biologis beserta sifat aktivitasnya; dan
2. jumlah fisik setiap kelompok aset biologis yang dimiliki entitas berupa ukuran atau estimasi nonkeuangan pada akhir periode dan hasil produk agrikultur selama periode tersebut.

Metode dan asumsi signifikan yang dipakai dalam penentuan nilai wajar setiap kelompok aset biologis maupun hasil pertanian juga diungkapkan oleh entitas..

Kemudian entitas juga mengungkapkan:

1. keberadaan aset biologis serta jumlah tercatat yang terdapat pembatasan kepemilikan dan jumlah tercatat aset biologis yang digunakan jaminan liabilitas;
2. sifat dan tingkat pembatasan pada pemanfaatan atau kapabilitas entitas untuk melakukan penjualan aset biologis;
3. jumlah komitmen untuk mengembangkan atau mengakuisisi aset biologis; dan
4. strategi terkait manajemen risiko keuangan dalam aktivitas agrikultur.

Rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat atau mutasi aset biologis yang terjadi antara awal dan akhir periode berjalan juga disajikan oleh entitas. Rekonsiliasi tersebut memuat:

1. keuntungan atau kerugian yang muncul akibat perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual;
2. peningkatan akibat pembelian;
3. peningkatan karena aset yang didapatkan dari transaksi non-pertukaran;
4. penurunan yang diatribusikan pada penjualan dan aset biologis yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok pelapasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual) sesuai dengan standar internasional atau standar nasional yang berkaitan dengan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan;
5. penurunan akibat panen;
6. peningkatan yang ditimbulkan dari kombinasi bisnis;
7. selisih kurs neto yang muncul akibat pemaparan laporan keuangan ke penyajian mata uang yang berbeda atau akibat pemaparan dari aktifitas usaha luar negeri ke penyajian mata uang entitas pelapor; dan
8. perubahan lainnya.

2.4.7 Pengungkapan Tambahan untuk Aset Biologis yang Nilai Wajarnya Tidak Dapat Diukur secara Andal

Berdasarkan IPSAS 27 paragraf 52, jika entitas melakukan pengukuran aset biologis pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan akumulasi kerugian penurunan nilai pada akhir periode, maka pengungkapan untuk aset biologis oleh entitas tersebut yaitu:

1. deskripsi dari aset biologis tersebut;
2. penjelasan mengenai alasan tidak dapat melakukan pengukuran nilai wajar dengan andal;
3. rentang estimasi keberadaan nilai wajar yang paling mungkin, jika memungkinkan;

4. metode penyusutan yang diterapkan;
5. masa manfaat atau tarif yang diterapkan dalam penyusutan, dan
6. jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi yang digabung dengan akumulasi kerugian penurunan nilai pada awal dan akhir periode.

Apabila sepanjang periode berjalan entitas melakukan pengukuran aset biologisnya pada harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai, maka pengakuan keuntungan atau kerugian atas aset biologis yang dilepas tersebut harus diungkapkan entitas dan rekonsiliasi yang disyaratkan dalam IPSAS 27 paragraf 48 harus mengungkapkan secara terpisah jumlah yang berhubungan dengan aset biologis tersebut. Selain itu, rekonsiliasi tersebut memuat jumlah berikut dalam surplus atau defisit terkait dengan aset biologis:

1. kerugian penurunan nilai;
2. pembalikan rugi penurunan nilai; dan
3. depresiasi.

Jika pada periode berjalan nilai wajar aset biologis yang sebelumnya diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai menjadi dapat diukur dengan andal, maka yang perlu diungkapkan entitas terkait aset biologis tersebut yaitu:

1. deskripsi dari aset biologis tersebut;
2. penjabaran terkait penyebab nilai wajar dapat diukur secara andal; dan
3. akibat yang timbul dari perubahan tersebut.

Ketika suatu entitas pada awalnya mengakui aset biologis atau produk agrikultur berdasarkan adopsi pertama kali atas dasar akrual, entitas harus melaporkan dampak pengakuan awal aset tersebut, sebagai penyesuaian atas saldo awal surplus atau defisit untuk periode dimana standar ini pertama kali diterapkan.

2.4.8 Perbedaan IPSAS 27 dengan PSAK 69

Ketetapan mengenai perlakuan akuntansi aset biologis yang telah diatur pada IPSAS 27 mayoritas sama dengan ketentuan IAS 41 yang sudah diadopsi dalam PSAK 69. Berikut beberapa hal yang membedakan:

1. Aset biologis yang dimanfaatkan untuk kepentingan penyediaan jasa tidak dimasukkan dalam ruang lingkup diberlakukannya IPSAS 27. Sebagai contoh yaitu aset biologis yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan kepolisian seperti kuda dan anjing. Aset ini tidak dikelola dengan melakukan pengukuran transformasi biologis secara rutin. Oleh karenanya aset ini tidak tergolong dalam aktivitas agrikultur.
2. Dalam IPSAS 27 ditambahkan dalam definisi aktivitas agrikultur aset biologis yang ditunjukkan baik dengan atau tanpa pembayaran untuk didistribusikan.
3. Tidak dicantumkan dalam IPSAS 27 syarat dan petunjuk mengenai hibah pemerintah yang terkait dengan aset biologis, seperti yang terdapat dalam IAS 41.
4. Pengelolaan Aktivitas agrikultur aset biologis dan produk agrikultur dengan tujuan untuk didistribusikan diakui dalam IPSAS, sedangkan IAS 41 hanya mengakui yang ditunjukkan untuk dijual.

Ketetapan lain yang terkait dengan pengakuan dan penilaian, keuntungan dan kerugian, ketiadaan pengukuran nilai wajar yang andal, serta pengungkapan, terdapat kesamaan antara IPSAS 27 dengan IAS 41 yang telah diadopsi dalam PSAK 69.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibuat berdasarkan acuan dari penelitian-penelitian terdahulu. Berikut akan diuraikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu:

1. Aisyah (2017)

Penelitian yang dilakukan Siti Aisyah berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK No.69 tentang Agrikultur pada PT. Perkebunan Nusantara X Jember Kebun Kertosari”. Aset biologis yang diteliti berupa tanaman kakao. Pada PTPN X Jember Kebun Kertosari, tanaman kakao diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu tanaman

produksi dan tanaman persediaan. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan perlakuan akuntansi aset biologis antara PTPN X Jember Kebun Kertosari dengan IAS 41 dan PSAK 69 yang terletak pada aspek pengukuran dan perbedaan pengakuannya.

2. Nafila (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Yayang Rochmatun Nafila berjudul “Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK No.69 pada PT. Tabassam Jaya Farm”. Aset biologis yang diteliti berupa ayam indukan yang terbagi menjadi dua, yaitu *upgrading* indukan dan ayam indukan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK.69, salah satunya yaitu PT. Tabassam Jaya Farm yang menggunakan pengukuran aset biologis berdasarkan harga perolehan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Selain itu, tidak terdapat penyesuaian aset biologis yang mati atau cacat.

3. Natasari dan Wulandari (2018)

Penelitian yang dilakuakn oleh Dina Natasari dan Rizky Wulandari berjudul “Akuntansi Aset Biologis: Perlukah Adopsi *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 27* dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)?”. Penelitian dijalankan dengan melaksanakan studi literatur dari berbagai teori dan penelitian yang terkait dengan bagaimana akuntansi aset biologis yang dilakukan oleh sektor pemerintahan. Hasil penelitian ini menyarankan SAP untuk melakukan adopsi *IPSAS 27 Agriculture* supaya ada ketentuan yang jelas mengenai bagaimana pengukuran, penilaian, dan penyajian dalam laporan keuangan sehingga penyajian wajar sesuai dengan karakteristik aset biologis yang berbeda dari aset tetap.

4. Natasari dan Wulandari (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Natasari dan Wulandari (2019) berjudul “Studi Kasus Perlakuan Akuntansi Aset Biologis berdasarkan *IPSAS 27 Agriculture* pada Dinas Pertanian X”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi yang menjadi pedoman bagi sektor pemerintah di Indonesia berbeda dengan ketentuan *IPSAS 27* khususnya untuk perlakuan

akuntansi aset biologisnya. Aset biologis yang dimiliki oleh entitas pemerintah tersebut yaitu sapi dan kambing. Aset hewan dilaporkan sesuai harga perolehan dan tidak dilakukan penyesuaian nilai aset setelah perolehan sehingga nilai aset selalu tetap. Hal ini akan berdampak pada nilai aset tercatat tidak sesuai dengan nilai hewan tersebut secara riil karena nilai hewan seharusnya bertambah seiring dengan umurnya. Sehingga penelitian ini merekomendasikan ketentuan perlakuan akuntansi aset biologis sesuai dengan IPSAS 27 karena IPSAS 27 mengatur diperlukannya pengukuran kembali atas nilai aset biologis setiap akhir periode laporan agar nilai tercatat sesuai dengan kondisi aset.

5. Uzlifah, dkk (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Uzlifah, dkk (2019) berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada Organisasi Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) Ijo Gading Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok budidaya Ikan Ijo Gading belum melakukan pencatatan berdasarkan standar yang telah berlaku yaitu PSAK 69, dilihat dari pengukuran masih menggunakan biaya historis sebagai harga perolehan dan pencatatan yang masih sederhana dan manual dengan mengendalikan nota dan kuitansi sebagai bukti transaksi.

Table 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1	Aisyah	2017	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK No.69 tentang Agrikultur pada PT. Perkebunan Nusantara X Jember Kebun Kertosari	Hasil dari penelitian terdapat perbedaan perlakuan akuntansi aset biologis antara PTPN X Jember Kebun Kertosari dengan IAS 41 dan PSAK 69 yang terletak pada aspek pengukuran dan perbedaan pengakuannya.
2	Nafila	2018	Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK No.69 pada PT. Tabassam Jaya Farm	Hasil penelitian menunjukkan perbedaan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK.69, salah satunya yaitu PT. Tabassam Jaya Farm yang menggunakan pengukuran aset biologis berdasarkan harga perolehan.
3	Natasari dan Wulandari	2018	Akuntansi Aset Biologis: Perlukah Adopsi <i>International Public Sector Accounting Standard</i> (IPSAS) 27 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)?	Hasil penelitian ini menyarankan SAP untuk melakukan adopsi IPSAS 27 <i>Agriculture</i> supaya ada ketentuan yang jelas mengenai bagaimana pengukuran, penilaian, dan penyajian dalam laporan keuangan sehingga penyajian wajar sesuai dengan karakteristik aset biologis yang berbeda dari aset tetap.
4	Natasari dan Wulandari	2019	Studi Kasus Perlakuan Akuntansi Aset Biologis berdasarkan IPSAS 27 <i>Agriculture</i> pada Dinas Pertanian X	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset hewan dilaporkan sesuai harga perolehan dan tidak dilakukan penyesuaian nilai aset setelah perolehan sehingga nilai aset selalu tetap. Sehingga penelitian ini merekomendasikan ketentuan perlakuan akuntansi aset biologis sesuai dengan IPSAS 27 karena IPSAS 27 mengatur diperlukannya pengukuran kembali atas nilai aset biologis setiap akhir periode laporan agar nilai tercatat sesuai dengan kondisi aset.
5	Uzlifah, Yasa, dan Dewi	2019	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada Organisasi Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) Ijo Gading Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok budidaya Ikan Ijo Gading belum melakukan pencatatan berdasarkan standar yang berlaku yaitu PSAK 69, dilihat dari pengukuran masih menggunakan biaya historis sebagai harga perolehan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas adalah bahwa secara umum persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu juga membandingkan perlakuan akuntansi aset biologis yang terdapat pada objek penelitiannya dengan perlakuan aset biologis standar yang berlaku. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada aset biologis berupa tanaman karet, tanaman tembakau, tanaman kakao, ayam indukan, dan budidaya perikanan. Sedangkan penelitian sekarang penelitian aset biologis berupa sapi perah. Serta perbedaan lainnya yaitu penelitian sekarang merupakan pengembangan dari penelitian Natasari dkk dengan meneliti objek penelitian pada sektor pemerintahan dengan aset biologis berupa sapi perah, dimana di Indonesia belum memiliki Standar Akuntansi Pemerintahan yang memberikan aturan secara khusus mengenai perlakuan akuntansi aset biologis. Sehingga peneliti menganalisis berdasarkan standar yang berlaku secara internasional yaitu IPSAS 27 *Agriculture*.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012:6) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk melakukan pemahaman tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya seperti tindakan dan perilaku, motivasi, persepsi dan lain-lain, secara menyeluruh dengan pertimbangan dari segala aspek, dan dideskripsikan dalam bentuk bahasa dan kata-kata, dalam suatu konteks khusus yang alamiah dengan menggunakan beberapa metode ilmiah. Teknik kualitatif menurut Cooper & Schindler (2006:143) dapat diperoleh melalui pendekatan-pendekatan yaitu studi kasus, analisa dokumen, wawancara individual, dan observasi langsung. Berdasarkan pendekatan ini, peneliti akan menangkap keadaan objek secara mendalam sehingga dapat mendeskripsikan tentang perlakuan akuntansi aset biologis pada Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember dan menganalisis serta menginterpretasikan dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata dalam tulisan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm yang terletak di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember dimana peternakan ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Letjend Suprpto No. 139, Lingkungan Krajan, Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data kualitatif, yaitu data dalam bentuk kalimat atau kata-kata, bagan, gambar, dan foto (Sugiyono, 2017:7). Data kualitatif dari penelitian ini adalah profil entitas, data literatur, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.
2. Data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2017:7). Data kuantitatif dari penelitian ini adalah data yang berwujud angka-angka seperti besarnya nilai aset biologis yang diakui oleh entitas dalam laporan keuangan, data berupa jumlah aset biologis, serta data lainnya yang diperlukan dalam penelitian.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, merupakan data yang didapatkan melalui pengamatan atau wawancara secara langsung bersama pihak pengelola Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm.
2. Data Sekunder, merupakan data yang didapatkan melalui catatan berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen entitas yang terkait dengan penulisan dalam bentuk laporan keuangan, serta catatan lain entitas terkait perlakuan akuntansi aset biologis yang mendukung proses penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data terkait penelitian ini, peneliti mengumpulkan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan mengkaji secara teoritis, memahami konsep yang terkait dengan penelitian, membaca artikel, jurnal, maupun buku yang terkait dengan penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan, merupakan penelitian dengan terjun secara langsung ke objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan peninjauan ke Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm dan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jember. Penelitian lapangan tersebut meliputi:
 - a. Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan kepala penanggung jawab Unit Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm dan staf bagian keuangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan beserta gambaran-gambaran perusahaan terutama terkait pengakuan dan pengukuran nilai aset biologis.
 - b. Observasi atau pengamatan, peneliti mengadakan pengamatan langsung kepada objek penelitian, yang bertujuan mendapatkan bahan atau data informasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember unit Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm.
 - c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan peninggalan tertulis seperti arsip, buku. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait perlakuan akuntansi aset biologis di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember unit Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm.

3.5 Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2017:270) uji keabsahan data pada penelitian kualitatif terdiri dari uji *credibility* (validitas internal), uji *transferability* (validitas eksternal), uji *dependability* (reabilitas), dan uji *confirmability* (obyektivitas). Uji *credibility* atau uji kredibilitas data pada penelitian kualitatif dapat diperoleh dengan cara melakukan masa perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi bersama dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan melakukan *membercheck*. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Menurut Moloeng (2012:330) terdapat empat macam teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memastikan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2017:244). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber. Menurut Moleong (2012:330) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Penelitian ini melakukan wawancara langsung kepada kepala penanggung jawab Unit Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm dan staf bagian keuangan di Kantor Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember. Kemudian hasil wawancara tersebut di cek dengan hasil observasi dan dokumentasi untuk menguji keabsahan data.

3.6 Teknik Analisis Data

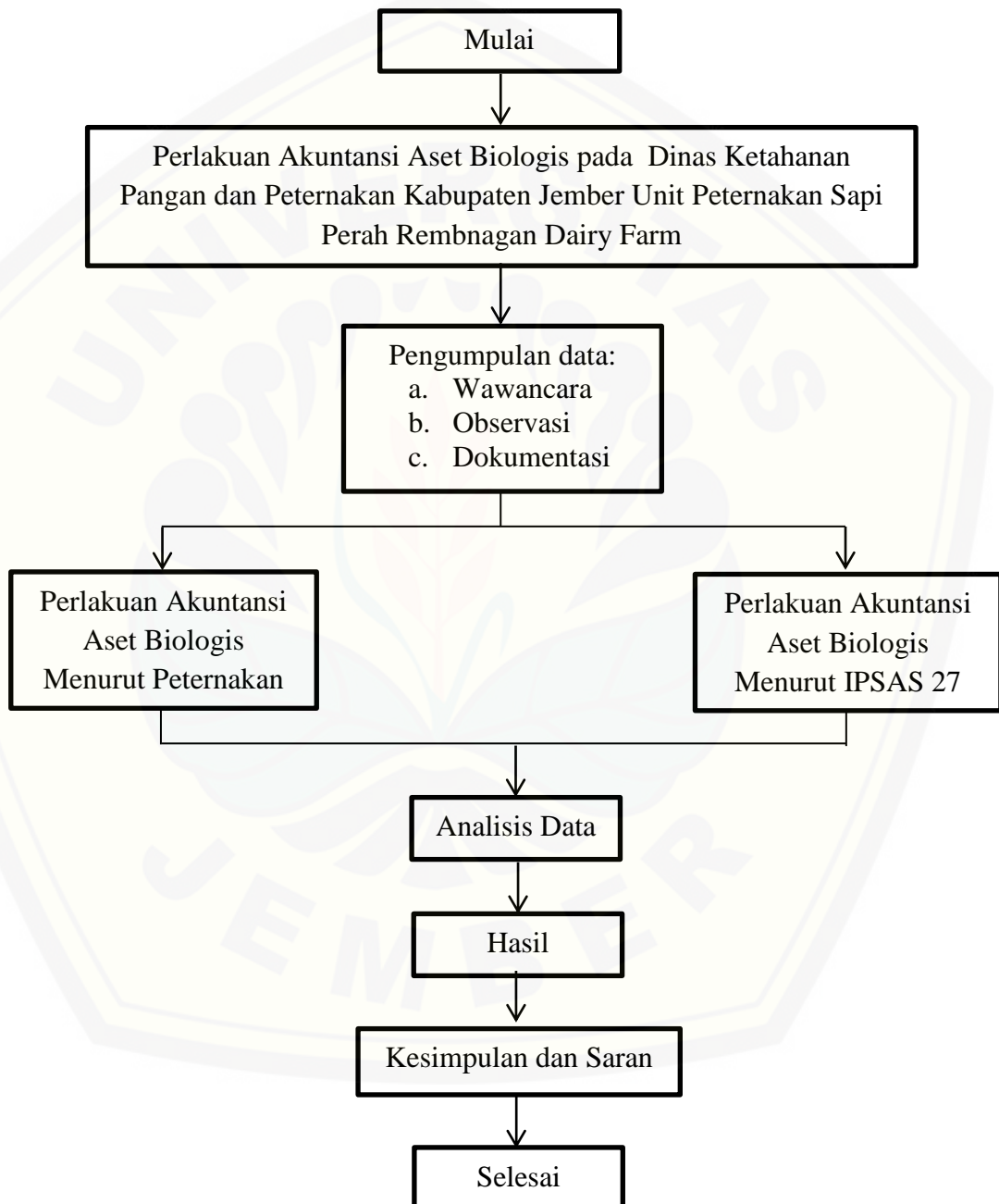
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menelaah dan mengkaji, kemudian memaparkan, serta menjelaskan data-data yang diperoleh pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember Unit Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm untuk mendapatkan deskripsi yang jelas dan lengkap terkait perlakuan aset biologis yang dimiliki peternakan sapi perah tersebut. Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam menganalisis data:

1. Mengumpulkan data melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perlakuan aset biologis yang diterapkan
2. Setelah memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perlakuan aset biologis yang diterapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember Unit Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm, langkah selanjutnya yaitu menganalisis dan membandingkan antara perlakuan akuntansi aset biologis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember Unit Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm dengan ketentuan yang termuat dalam *IPSAS 27 Agriculture*.
3. Setelah melakukan analisis, maka peneliti mengetahui kesesuaian dan/atau perbedaan antara perlakuan akuntansi aset biologis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember Unit Peternakan Sapi Perah Rembangan Dairy Farm dengan ketentuan yang termuat dalam *IPSAS 27 Agriculture*, kemudian peneliti menarik kesimpulan atas penelitian yang dilaksanakan. Kesimpulan dalam penelitian ini menjadi jawaban dari rumusan masalah.



3.7 Kerangka Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 3.1 Kerangka Penelitian

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember terkait perlakuan akuntansi aset biologis berupa sapi perah dengan berdasarkan IPSAS 27, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan Aset Biologis

Pengakuan aset biologis berupa sapi perah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember terjadi ketika setelah terjadinya pembelian dan hak kepemilikan/penguasaan telah diterima atau berpindah, serta aset biologis tersebut diakui jika memenuhi kriteria yang sama dengan aset tetap. Hal tersebut tidak sesuai dengan pengakuan aset biologis berdasarkan IPSAS 27 yang mengakui aset biologis ketika aset biologis dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa lalu, terdapat kemungkinan besar aliran manfaat ke entitas, serta pengukuran nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat dilakukan dengan andal.

2. Pengukuran Aset Biologis

Pengukuran aset biologis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember diukur berdasarkan biaya perolehannya atau sebesar SPJ yang telah dikeluarkan oleh dinas. Pengukuran tersebut hanya dilakukan ketika pengakuan awal dan tidak terdapat penyusutan untuk aset biologis sehingga nilainya tetap dari tahun ke tahun. Hal tersebut tidak sesuai dengan pengukuran aset biologis berdasarkan IPSAS 27 yang mengukur aset biologis berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Pengukuran dilakukan pada pengakuan awal dan setiap tanggal pelaporan, serta penyusutan dilakukan untuk aset biologis yang menghasilkan. Sehingga nilai aset biologis yang disajikan mencerminkan nilai yang riil sesuai dengan kondisi dan keadaan aset atau sesuai dengan kontribusi aset biologis yang mengalir ke entitas. Pengukuran kembali dari aset biologis akan menimbulkan keuntungan atau

kerugian, keuntungan atau kerugian ini harus diakui dalam surplus atau defisit pada periode terjadinya. Sedangkan untuk produk agrikultur berupa susu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember mengukur berdasarkan harga pasarnya, hal tersebut telah sesuai dengan IPSAS 27 yang mengukur produk agrikultur berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dimana nilai wajar dapat diperoleh melalui nilai transaksi terbaru atau harga pasar dari aset serupa.

3. Penyajian Aset Biologis

Aset biologis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember disajikan pada laporan keuangan sebagai bagian dari Aset Tetap yaitu Aset Tetap Lainnya. Penyajian tersebut tidak memberikan pengelompokan atau atribut tertentu. Hal tersebut tidak sesuai dengan IPSAS 27 yang menyajikan aset biologis pada kelompok aset tidak lancar dengan mengkalifikasikan berdasarkan atribut tertentu seperti aset biologis belum menghasilkan dengan aset biologis menghasilkan, atau aset biologis produktif dengan aset biologis konsumsi sehingga informasi yang dihasilkan lebih jelas. Kemudian untuk produk agrikultur disajikan dalam kelompok aset lancar yaitu Persediaan.

4. Pengungkapan Aset Biologis

Pengungkapan aset biologis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember tidak memberikan deskripsi secara khusus, Catatan atas Laporan Keuangan hanya mengungkapkan mutasi dari Aset Tetap Lainnya secara umum. Aset biologis tidak diberikan deskripsi yang secara khusus memberikan informasi mengenai kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut berbeda dengan IPSAS 27 yang mengajurkan mengungkapkan aset biologis secara deskriptif kuantitatif dan deskriptif naratif untuk membedakan antara aset biologis yang dapat dikonsumsi dan aset biologis produktif, atau antara aset biologis menghasilkan dan aset biologis belum menghasilkan. Keuntungan dan kerugian yang timbul akibat perlakuan akuntansi aset biologis ini juga harus diungkapkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebagai akibat dari karakteristik aset biologis yang berbeda dari aset lainnya, aset biologis membutuhkan standar khusus untuk mengatur perlakuan akuntansinya. IPSAS 27 dapat menghasilkan informasi yang lebih baik untuk perlakuan akuntansi aset biologis, namun untuk penerapan ataupun adopsi masih perlu melibatkan berbagai pihak untuk melihat biaya dan manfaat sebagai akibat dari adopsi standar tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini tidak memperoleh data berupa harga satuan aset biologis untuk memberikan contoh penerapan penilaian konsep nilai wajar, untuk mendapatkan data tersebut peneliti mencoba memperoleh SPJ yang dikeluarkan untuk pembelian sapi perah namun juga tidak diperoleh dikarenakan pengadaan aset biologis oleh objek penelitian telah dilakukan sejak lama, sehingga peneliti menggunakan jumlah total dari aset biologis yang menyebabkan contoh penerapan penilaian menggunakan konsep nilai wajar dalam penelitian ini menjadi bias.

5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan sebagai bahan penelitian yang selanjutnya terkait dengan topik bahasan yang sama yaitu peneliti selanjutnya mampu memperoleh data berupa harga satuan dari aset biologis untuk memberikan contoh penerapan penilaian aset biologis menggunakan konsep nilai wajar secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung.2012.Akuntansi Pemerintahan Daerah.Bandung: Alfabeta.
- Aisyah, F N. 2017. “Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Menurut PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Kertowo dan PSAK 69”. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Al Haryono Jusup, 2011, “Dasar –Dasar Akuntansi”, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Arimbawa, Putu Megi, Ni Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni. 2016. “Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Organisasi Kelompok Tani Ternak Sapi Kerta Dharma DEsa Tukadnungga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng”. *E-Journal*. Universitas Pendidikan Ganesha. Diakses 8 September 2019.
- Badan Pusat Statistik. Data Peternakan Tahun 2017-2018. www.bps.go.id. [Diakses pada 22 Maret 2019].
- Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak. Harga Sapi Perah. http://bbptusapiperah.ditjenpkh.pertanian.go.id/?page_id=2144 [Diakses pada 10November 2019]
- Cooper, Donald R, dan Pamela S. Schindler. 2006. “Metode Riset Bisnis”. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Farida, Ike. 2013. “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan International Accounting Standards 41 Pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)”. *E-journal*. Universitas Negeri Surabaya. Diakses 22 Maret 2019.
- Hafiz, Abdul Tanjung. 2012. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual. Bandung: Alfabeta.
- Harlinda. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Riau). <https://media.neliti.com/media/publications/235061-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-361f27bf.pdf>. [Diakses pada 25 Maret 2019].
- International Public Sector Accounting Standard Board, 2009, *International Public Sector Accounting Standard 27 Agriculture*. www.ifrs.org.



- Ijeoma, N.B. (2018) yang berjudul “*The Impact Of International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) On Reliability, Credibility and Integriti Of Financial Reporting In State Government Administartion In Negeria*”. *E-Journal*. Department of Accountancy Nnamdi Azikiwe University Awka. (International Jounal of Tecnologi Enhancements and Emerging Engineering Research, Vol 2, Issue 3 ISSN 2347-429)
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 69 *Agrikultur*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 Revisi 2011 Aset Tetap. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 01 Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: IAI.
- Jusup, Al Haryono. 2011. *Dasar –Dasar Akuntansi*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Kieso, Donald E, Jerry J. Weygant dan Terry D. Warfield. 2016. *Intermediate Accounting* Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 476 KMK 01. 1991. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1994/476~KMK.04~1994Kep.htm> [Diakses pada 22 Maret 2019].
- Margarita Legenkova. 2016. “*International Public Sector Accounting Standards Implementations in the Russian Federation*”. *E-Journal*. National Research Nuclear university MEPhl. (International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, 6(4), 1304-1309, ISSN: 2146-4138).
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remadja Karya.
- Nafila YR. 2018. Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasrakan PSAK No.69 pada PT Tabassam Jaya Farm. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. Diakses pada 22 Maret 2019.
- Natasari, Dina, Rizky Wulandary. 2018. Akuntansi Aset Biologis: Perlukah Adopsi *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 27* dalam Standar Akuntansi Pemenrintahn (SAP). *E-journal*. Universitas Gajah Mada. (Vol. 1 No.1, Januari 2018, 71-79).

- Natasari, Dina, Rizky Wulandary. 2019. Studi Kasus Perlakuan Akuntansi Aset Biologis berdasarkan IPSAS 27 *Agriculture* pada Dinas Pertanian X. *E-journal*. Universitas Gajah Mada. (Jurnal MONEX Vol. 8 No.1, Januari 2019).
- Nur Indriantoro, Bambang Supomo. 20116. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>
- Ridwan, Achmad. 2011. Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PT.Perkebunan Nusantara XIV Makasar (Persero). Skripsi. Makasar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Diakses 22 Maret 2019.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Uzlifah, I Nyoman P.Y, Putu Eka D.M.D. 2019. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Organisasi Kelompok Budidaya Ikan (PODOKAN) Ijo Gading Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. *E-journal*. Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 9(Vol:10 No.1 Tahun 2019).
- Valencia, Z.G. 2017. Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Wigrha, P. 2018. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK 69 Agrikultur pada PT Perkebunan Nusantara XII Nrangkah Pawon. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Lampiran 1**Hasil Wawancara**

Narasumber : drh. Eko

Jabatan : Penanggung jawab Peternakan Rembangan Dairy Farm, Staf Bidang Peternakan

Waktu : 17 Oktober 2019

Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak/ibu mengetahui atau pernah mendengar tentang apa itu aset biologis? Menurut bapak/ibu aset biologis ini merupakan aset yang seperti apa?	Jujur saya belum tahu mbak...apalagi kalau dikaitkan dengan ekonomi
2	Tahun berapa peternakan berdiri?	Emm kalau berdirinya sendiri sudah dari dulu mbak, saya mulai ditugaskan mengelola yang di rembangan itu sejak tahun 2012 sudah ada peternakannya, jadi tujuan sebenarnya itu untuk melestarikan karena disini kita tidak seperti UPT
3	Apa saja ruang lingkup aktivitas dalam peternakan?	Untuk aktivitasnya disini kita ada tiga, ada seksi pembibitan, seksi produksi, terus sama seksi pengembangan.
4	Bagaimana pengakuan awal atas aset biologis tersebut?	Emmm itu kan dari dulu mbak yaa jadi dari pemerintah kita disini pengelolanya, aset sapinya sendiri dari pembelian...tapi ada juga kalau sapi melahirkan anak berupa sapi betina itu kita kembangbiakkan.
5	Mulai umur berapa sapi siap untuk berproduksi?	Rata-rata umur 2 – 2.5 tahun itu sudah bisa berproduksi
6	Apakah ada pengelompokan tertentu dari aset biologis tersebut? (berdasarkan umur, kualitas, jenis sapi dll)	O tidak ada mbak, hanya ada satu jenis sapi yaitu sapi perah belanda
7	Bagaimana pengukuran atas aset biologis tersebut?	Karena kita melakukan belanja modal jadi yaa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk awal waktu beli itu yang dicatat

8	Bagaimana menilai/mengukur produk agrikulturnya (susu)?	Kalau susu yang dihasilkan langsung dijual jadi sudah ada yang mengambil...istilahnya looper, harganya sendiri yaa sesuai harga dipasar...terus uang hasil penjualan susu itu kita gunakan untuk pengelolaan pakan sapi, dan kalau ada sisa disetor ke bendahara penerimaan.
9	Bagaimana perlakuan akuntansi bagi anak sapi?	Biasanya kalau anaknya jantan itu kita jual, kalau yang betina kita kembangkan. Hasil penjualannya perlakuan juga sama seperti penjualan susu tadi... kalau penilaian tidak ada kita hanya mencatat berapa ekor.
10	Bagaimana perlakuan akuntansi bagi aset biologis yang sudah tidak bisa memproduksi atau aset biologis yang mati?	Karena kita dilingkungan birokrasi yaa mbak, jadi yaa menunggu penghapusan aset..(hahaha)
11	Bagaimana penyajian aset biologis dalam laporan keuangan?	Itu setau saya masuk aset
12	Bagaimana pengungkapan aset biologis dalam laporan keuangan?	Oo kalau itu saya kurang tau mbak, tapi yang jelas itu tidak ada deskripsi tertentu karena sapi hanya ada satu jenis itu tadi.
13	Apakah bapak mengetahui standar yang digunakan sebagai pedoman pencatatan aset biologis dalam pemerintahan?	Kurang tahu mbak.(hahaha)

Lanjutan Lampiran 1

Narasumber : Ibu Jubaida

Jabatan : Staf Bagian Keuangan

Waktu : 17 Oktober 2019

Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang apa itu aset biologis? Menurut bapak/ibu aset biologis ini merupakan aset yang seperti apa?	Yang mana ya mbak ...Oooo aset yang itu yaa mbak barang hidup...(hahaha)
2	Apakah anda mengetahui SAP di Indonesia yang mengatur tentang aset biologis?	Kalau di aset aku ngga begitu anu mbak kan ada petugasnya sendiri kalau aset, ada bagian pencatatannya sendiri, kalo disini yang keuangan aja, jadi yangvlaporan akhir dari petugasnya itu dikumpul disini..dari yang bersangkutan.
3	Bagaimana pengakuan atas aset biologis?	Ooo kan itu ada kaya riwayatnya sendiri itu mbak, kalau aset itukan masuk belanja modal, dari tahun ke tahun selalu ada dan berkelanjutan jadi kalau ada tambahan pembelian ya ditambahkan. Jadi ya dari setelah pembelian itu.
4	Bagaimana pengukuran atas aset biologis?	Kalau pengukurannya ya sesuai pembelian itu, sesuai denga SPJ yang dikeluarkan, itu semua termasuk pajaknya juga jadi aset, jadi seluruh biaya yang dikeluarkan itu.
5	Bagaimana penyusutan atas aset biologis berupa sapi?	Kalau aset biologis kan biasanya bertambah, ada anaknya biasanya. Kalau penyusutanya saya belum pernah tahu karena belum pernah menangani. Tapi aset biologis disini tidak ada penyusutannya.
6	Bagaimana penyajian aset biologis dalam laporan keuangan?	Jadi kan kalau kita laporan keuangannya ada formatnya sendiri mbak dari BPKA, kalau aset biologis ini masuk aset tetap lainnya.
7	Bagaimana pengungkapan aset	kalau pengelompokan tidak sebegitu

	biologis dalam laporan keuangan? Apakah diberikan deskripsi berdasarkan kelompoknya?	rinci ya mbak, Cuma ada anak berapa, induk berapa, kalau dilaporan neracanya ya langsung aset tetap lainnya berapa gitu...dijadikan satu tidak dikelompokkan
8	Bagaimana perlakuan akuntansi bagi aset biologis yang sudah tidak dapat memproduksi atau mati?	Biasanya dihapuskan dari aset.
9	Bagaimamana pengakuan keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari aset biologis tersebut?	Itu masuk ke PAD
10	Apakah bapak/ibu pernah mendengar atau mengetahui mengenai standar akuntansi internasional aset biologis yaitu IPSAS 27?	Belum tahu mbak (hahaha)..tapii kalau petugas yang menangani mungkin sudah tahu.
11	Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika terdapat standar akuntansi pemerintahan yang secara khusus memberikan pedoman mengenai perlakuan akuntansi aset biologis?	Yaa pastinya diperlukan yaa mbak, tapi ya harus ada sosialisasi dulu.

Lampiran 2

Data Perkembangan Ternak Sapi Perah Rembangan

Tahun	Jumlah awal		Penambahan		Mati		Jumlah akhir		Keterangan
	Induk	Anak	Induk	Anak	Induk	Anak	Induk	Anak	
2005	20	0	0	0	0	0	20	0	
2006	20	0	0	0	0	0	20	0	
2007	20	0	0	2	0	0	20	2	
2008	20	2	0	2	0	0	20	4	
2009	20	4	0	0	0	0	22	2	
2010	22	2	0	2	0	0	24	4	
2011	24	4	0	3	6	0	20	5	
2012	20	5	0	1	0	1	22	3	
2013	22	3	5	3	0	0	27	3	
2014	27	3	0	3	0	1	27	5	
2015	27	5	0	2	2	2	25	5	
2016	25	5	0	3	0	3	25	5	
2017	25	5	0	2	3	5	22	2	
2018	22	2	0	3	0	0	22	5	

Lampiran 3

Neraca Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan kabupaten Jember

NERACA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER Per 31 Desember 2018 dan 2017		
Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 . 01	URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	(Dalam Rupiah)
URAIAN	2018	2017
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas di Bendahara JKN	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Rutang Pendapatan	0,00	0,00
Rutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Rutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	21.542.690,00	7.917.340,00
JUMLAH ASET LANCAR	21.542.690,00	7.917.340,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	7.262.049.000,00	7.262.049.000,00
Peralatan dan Mesin	4.585.778.694,00	4.182.537.827,33
Gedung dan Bangunan	13.226.440.550,00	11.576.200.550,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	567.415.000,00	567.415.000,00
Aset Tetap Lainnya	402.300.800,00	354.900.800,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.521.210.384,35)	(5.712.582.424,30)
JUMLAH ASET TETAP	19.522.773.659,65	18.230.520.753,03
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	44.950.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	79.600.000,00	3.753.148.830,00
Aset Tidak Berwujud	3.753.148.830,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	(32.710.000,00)
Aset Yang Telah Dihilangkan	(42.700.000,00)	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya		

Lanjutan Lampiran 3

URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN		2018	2017
Urusan Pemerintahan : 3 . 03			
Unit Organisasi : 3 . 03 . 02			
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 . 01			
URAIAN			
JUMLAH ASET LAINNYA		3.790.048.830,00	3.765.388.830,00
JUMLAH ASET		23.334.365.179,65	22.003.826.923,03
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00		0,00
Utang Bunga	0,00		0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00		0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00		0,00
Utang Beban	4.014.115,00		4.408.927,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00		0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.014.115,00		4.408.927,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	0,00		0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00		0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00		0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	4.014.115,00		4.408.927,00
EKUI TAS			
EKUITAS	23.330.351.064,65		21.999.417.996,03
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUI TAS DANA	23.334.365.179,65		22.003.826.923,03

Lampiran 4

Laporan Operasional Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PILIHAN
Bidang Pemerintahan : 3.03 PERTANIAN
Unit Organisasi : 3.03.02 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
Sub Unit Organisasi : 3.03.02.01 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAI KANI (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	214.192.000,00	207.996.000,00	6.196.000,00	2,98
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	214.192.000,00	207.996.000,00	6.196.000,00	2,98
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	163.192.000,00	153.296.000,00	9.896.000,00	6,46
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	51.000.000,00	54.700.000,00	(3.700.000,00)	(6,76)
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.957.025.522,38	8.119.655.319,98	(162.629.797,60)	(2,00)
9	BEBAN	3.893.838.173,00	3.269.192.044,00	604.646.129,00	18,38
9.1.1	Beban Pegawai - LO	3.199.845.656,00	3.855.517.822,00	(655.671.966,00)	(17,01)
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	863.341.493,38	974.945.453,98	(111.603.960,60)	(11,45)
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Halaman 1 dari 3

LAPORAN OPERASIONAL
31 Desember 2018

Lanjutan Lampiran 4

Bidang Pemerintahan : 3.03 PERTANIAN					
Unit Organisasi : 3.03.02 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN					
Sub Unit Organisasi : 3.03.02.01 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.7	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISI T DARI OPERASI		(7.742.833.522,38)	(7.911.859.319,98)	168.825.797,60	(2,13)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISI T DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(7.742.833.522,38)	(7.911.859.319,98)	168.825.797,60	(2,13)
SURPLUS/ DEFISI T SEBELUM POS LUAR BIASA					
POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISI T DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISI T-LO		(7.742.833.522,38)	(7.911.859.319,98)	168.825.797,60	(2,13)

Lampiran 5

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan OPD adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca dan Laporan Operasional berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas dan Pendapatan-LO serta Beban-Lo diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh

pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Pengakuan Pendapatan dan Belanja

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

2. Pengakuan Pendapatan –LO dan Beban-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan atau saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3. Persediaan

Persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan dan dinilai dengan cara harga pembelian akhir apabila diperoleh dengan pembelian atau harga/nilai wajar atau estimasi nilai perolehan.

4. Aset Tetap

Aset tetap dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset hingga siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Belanja pemeliharaan dan perbaikan yang memperpanjang masa manfaat aktiva atau mengakibatkan peningkatan masa ekonomis di masa mendatang dikapitalisasikan ke nilai aktiva yang bersangkutan. Pengeluaran belanja tersebut dibebankan ke operasi pada periode berjalan. Aktiva yang sudah tidak digunakan lagi karena rusak dan

aktiva yang sudah berubah status hukumnya, baik karena dijual ataupun diserahkan kepada pihak lain, akan dihapus dari akun aktiva bersangkutan serta mengurangi nilai Ekuitas.

Aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat berdasarkan nilai pembayaran/SP2D yang telah diterbitkan sampai dengan tanggal neraca. Aset tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, usang, hilang dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan adalah:
 - a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan OPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dsar kas (*cash basis*) dengan metode penilaian atas dasra akrual (*accrual basis*).
 - c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggarn, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
 - d. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
 - e. Seluruh kekayaan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Jember.
 - f. Laporan Keuangan disusun berdasarakan konsep harga perolehan.
6. Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standard an kebijakan akuntansi, dan akan disesuaikan (*adjustment*) ke tahun berikutnya.
7. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, menggunakan kode rekening berdasarakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

D. Kebijakan Akuntansi Akun

Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap terdiri dari:
 - (a) Tanah
 - (b) Peralatan dan Mesin:
 - Alat-Alat Berat
 - Alat-Alat Angkutan
 - Alat Bengkel
 - Alat Pertanian dan Peternakan
 - Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - Alat Studio dan Alat Komunikasi
 - Alat Ukur
 - Alat Kedokteran
 - Alat Laboratorium
 - Alat Keamanan
 - (c) Gedung dan Bangunan:
 - Bangunan Gedung
 - Bangunan Monumen
 - (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan:
 - Jalan dan Jembatan
 - Bangunan Air (Irigasi)
 - Instalasi
 - Jaringan
 - (e) Aset Tetap Lainnya:
 - Buku-Buku/Buku Perpustakaan
 - Barang Bercorak Seni dan Budaya
 - Hewan Ternak dan Tanaman
 - (f) Konstruksi dalam Pengerjaan

- c. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaanya berpindah.
- d. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.
- e. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut dicatat sebagai beban dan diadministrasikan secara ekstra komtabel.
- f. Komponen biaya aset tetap merupakan biaya perolehan aset tetap yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- g. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- h. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- i. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan biaya wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

- j. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- k. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- l. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- m. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- n. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*), dengan perkiraan masa manfaat untuk setiap aset sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi.
- o. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai sifat dan karakteristik aset tersebut.
- p. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- q. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- r. Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset, dengan nilai perolehannya, diikuti akumulasi penyusutan, sehingga diketahui nilai buku aset tetap.

Lampiran 6

Contoh Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan IPSAS 27 Agriculture

Disclosure Requirements*Statement of Financial Position*

Entity XYZ	Notes	December 31, 20X8 Currency Unit (CU)	December 31, 20X7 CU
ASSETS			
Current assets			
Cash		10,000	10,000
Receivables		88,000	65,000
Inventories		82,950	70,650
Total current assets		180,950	145,650
Non-current assets			
Bearer biological assets			
Dairy livestock – immature ¹		52,060	47,730
Dairy livestock – mature ¹		372,990	411,840
Subtotal – bearer biological assets	3	425,050	459,570
Property, plant and equipment		1,462,650	1,409,800
Total non-current assets		1,887,700	1,869,370
Total assets		2,068,650	2,015,020
LIABILITIES			
Current liabilities			
Payables		122,628	150,020
Total current liabilities		122,628	150,020
NET ASSETS/EQUITY			
Contributed capital		1,000,000	1,000,000
Accumulated surplus		946,022	865,000
Total net assets/equity		1,946,022	1,865,000
Total net assets/equity and liabilities		2,068,650	2,015,020

Lampiran 7Contoh Laporan Kinerja Keuangan Berdasarkan IPSAS 27 *Agriculture**Statement of Financial Performance*

Entity XYZ	Notes	CU
		Year ended December 31, 20X8
Fair value of milk produced		518,240
Gains arising from changes in fair value less costs to sell of dairy livestock held for sale	3	39,930
		558,170
Inventories used		(137,523)
Staff costs		(127,283)
Depreciation expense		(15,250)
Other operating expenses		(197,092)
		(477,148)
Surplus for the period		81,022

Lampiran 8Contoh Laporan Perubahan Ekuitas Berdasarkan IPSAS 27 *Agriculture**Statement of Changes in Net Assets/Equity*

	Year ended December 31, 20X8		
	CU	CU	CU
	Contributed Capital	Accumulated Surplus	Total
Balance at January 1, 20X8	1,000,000	865,000	1,865,000
Surplus for the period	-	81,022	81,022
Balance at December 31, 20X8	1,000,000	946,022	1,946,022

Lampiran 9Contoh Laporan Arus Kas Berdasarkan IPSAS 27 *Agriculture**Cash Flow Statement²*

Entity XYZ

Year ended
December 31, 20X8

	CU
Cash flows from operating activities	
Cash receipts from sales of milk	498,027
Cash receipts from sales of livestock	97,913
Cash paid for supplies and to employees	(504,025)
Cash paid for purchases of livestock	(23,815)
Net cash from operating activities	68,100
Cash flows from investing activities	
Purchase of property, plant and equipment	(68,100)
Net cash used in investing activities	(68,100)
Net increase in cash	0
Cash at beginning of the year	10,000
Cash at end of the year	10,000

Lampiran 10

Contoh Perbandingan Laporan Operasional Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember dengan Laporan Operasional Berdasarkan IPSAS 27 Agriculture

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan		IPSAS 27	
KEGIATAN OPERASIONAL		KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN – LO	<u>214.192.000,00</u>	PENDAPATAN – LO	<u>214.192.000,00</u>
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	<u>214.192.000,00</u>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	<u>214.192.000,00</u>
Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	163.192.000,00	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	163.192.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00
Lain-lain PAD yang Sah – LO	51.000.000,00	Lain-lain PAD yang Sah – LO	51.000.000,00
PENDAPATAN TRANSFER – LO	<u>0,00</u>	PENDAPATAN TRANSFER – LO	<u>0,00</u>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LO	0,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LO	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	0,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00
Bantuan Keuangan – LO	0,00	Bantuan Keuangan – LO	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	<u>0,00</u>	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	<u>0,00</u>
Pendapatan Hibah – LO	0,00	Pendapatan Hibah – LO	0,00
Dana Darurat – LO	0,00	Dana Darurat – LO	0,00
Pendapatan Lainnya – LO	0,00	Pendapatan Lainnya - LO	0,00

BEBAN	<u>7.957.025.522,38</u>	BEBAN	<u>7.957.025.522,38</u>
Beban Pegawai – LO	3.893.838.173,00	Beban Pegawai – LO	3.893.838.173,00
Beban Barang dan jasa	3.199.845.856,00	Beban Barang dan jasa	3.199.845.856,00
Beban Bunga	0,00	Beban Bunga	0,00
Beban Subsidi	0,00	Beban Subsidi	0,00
Beban Hibah	0,00	Beban Hibah	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	Beban Bantuan Sosial	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	863.341.493,38	Beban Penyusutan dan Amortisasi	863.341.493,38
Beban Penyisihan Piutang	0,00	Beban Penyisihan Piutang	0,00
Beban Lain-lain	0,00	Beban Lain-lain	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7.742.833.522,38)	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7.742.833.522,38)

KEGIATAN NON OPERASIONAL		KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	Surplus atas Penilaian Aset Non Lancar (aset biologis) – LO	139.260.000,00
Deficit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	Surplus atas Penilaian Persediaan (produk agrikultur)	5.400.000,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00
		Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00
		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	144.660.000,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7.742.833.522,38)	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7.598.173.522,38)
POS LUAR BIASA		POS LUAR BIASA	
Pendapatan Luar Biasa – LO	0,00	Pendapatan Luar Biasa – LO	0,00
Beban Luar Biasa – LO	0,00	Beban Luar Biasa – LO	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7.742.833.522,38)	SURPLUS/DEFISIT - LO	(7.598.173.522,38)

Lampiran 11

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E - ASET TETAP LAINNYA
dinas ketahanan pangan dan peternakan

TAHUN :

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan			Hewan Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Tahun cetak/ Pembelian	Asal Usul	Harga (Ribuan)	Ket.	Kode Kategori	Nama Lembaga	ekskom p
		Kode Brg	Reg	Judul / Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Buku Djember Tempoe Doel	-	4	-	-	-	-	-	Buku	Eks	4	0	-	1.900.000	Hibah Kantor Perp	1.3.5.1	DINAS KETA	NO
2	SAPI	-	1	-	-	-	-	-	Binatang	-	1	0	-	89.750.000	-	1.3.5.6	DINAS KETA	NO
3	SAPI PERAH	-	20	-	-	-	-	-	Binatang	-	20	0	-	105.000.000	-	1.3.5.6	DINAS KETA	NO
4	Sapi perah	-	5	-	-	-	-	-	Binatang	Ekor	5	0	-	109.250.000	-	1.3.5.6	DINAS KETA	NO
5	Kuda	-	2	-	-	-	-	-	Binatang	Ekor	2	0	-	49.000.000	-	1.3.5.6	DINAS KETA	NO